



Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal Ahts. PASIFIC BRONZE pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam oleh PT. Pelayaran Siltor Adimulia Batam

Wasinton B. Hutagaol¹, Dirhamsyah², Fadiyah Hani Sabila³

^{1,2,3} Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: hutagaolwasinton@gmail.com

Abstract. *PT. Pelayaran Siltor Adimulia which operates in the field of Ship Agency Services, which has served many domestic and foreign ships, PT. Siltor Adimulia Shipping has a combination of knowledge of the shipping industry and Marine services with experienced staff, and always provides needs with satisfaction. Operational department of PT. Siltor Adimulia Shipping will take care of all the needs and requirements for extending the ship's safety certificate. The results of the research regarding ship safety certificate extension services, the agent's role is to prepare everything in the procedures for extending ship safety certificates until a new certificate is issued. The activity for extending the ship's safety certificate went quite well but was less than optimal, due to a lack of coordination between the ship and the Marine Inspector who came to the ship during the inspection. For the stages of extending the AHTS ship safety certificate. PACIFIC BRONZE at PT. Sailing Siltor Adimulia Batam on the Batam Special KSOP is more optimal, it is recommended to increase good cooperation and time coordination to improve communication channels between the ship and the Marine Inspector when they want to carry out this work.*

Keywords: *Extensions, Certificates, Ship Safety*

Abstrak. PT. Pelayaran Siltor Adimulia yang bergerak dibidang Jasa Keagenan Kapal (*Shipping Agency*), yang sudah banyak melayani kapal dalam negeri dan kapal luar negeri, PT. Pelayaran Siltor Adimulia memiliki kombinasi dari pengetahuan tentang industri perkapalan dan layanan Kelautan dengan staf yang berpengalaman, dan selalu menyediakan kebutuhan dengan kepuasan. Bagian operasional PT. Pelayaran Siltor Adimulia akan mengurus segala kebutuhan dan keperluan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal. Hasil penelitian dalam pelayanan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal pihak agen berperan mempersiapkan segala hal dalam prosedur pengurusan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal sampai sertifikat baru terbit. Kegiatan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal berjalan dengan cukup baik namun kurang optimal, karena kurangnya kordinasi antara pihak kapal dan *Marine Inspector* yang turun ke kapal pada saat pemeriksaan. Untuk tahapan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal AHTS. PASIFIC BRONZE di PT. Pelayaran Siltor Adimulia Batam pada KSOP Khusus Batam lebih optimal disarankan meningkatkan kerja sama yang baik dan koordinasi waktu memperbaiki saluran komunikasi antara pihak kapal dan *Marine Inspector* saat ingin melakukan pekerjaan tersebut.

Kata Kunci : Perpanjangan, Sertifikat,, Keselamatan Kapal

1. LATAR BELAKANG

Beberapa faktor didalam tercapainya keselamatan adalah dengan mempersiapkan kapal layak laut. Sedangkan komponen-komponen yang harus dipersiapkan didalam menyiapkan kapal layak laut adalah membuat suatu keadaan kapal kapal siap beroperasi setelah memenuhi sehubungan dengan persyaratan keamanan dan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran di perairan yang disebabkan oleh kegiatan operasi kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejakteraan ABK, kesehatan penumpang, status hukum kapal dan sertifikasi, manajemen keselamatan, manajemen keamanan untuk kapal dapat belrayar di suatu pelairan

Perusahaan keagenan sangat berperan penting pada kegiatan pelayaran dan berpengaruh besar pada kelancaran perkenomoian serta perdanganan, Namun terkadang didalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal tersebut dengan pada saat diadakannya survey dilapangan oleh Marine Inspector (MI) terkadang masih memakan waktu karena hasil dari survey dilapangan tidak langsung diterima oleh pihak kementerian. Masih adanya proses manual dan juga melibatkan agen-agen kapal untuk mengurusnya. Akibat dari proses yang cukup memakan waktu tersebut maka juga berpengaruh terhadap proses operasi kapal itu sendiri dan dampaknya juga dari segi bisnis tentu berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan pelayaran maupun lebih jauh lagi terganggu dalam rantai pasok barang, maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Proses Penerbitan Sertifikat keselamatan kapal dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan penerbitan sertifikat keselamatan kapal

. Perusahaan keagenan sangat berperan penting pada kegiatan pelayaran dan berpengaruh besar pada kelancaran perkenomoian serta perdanganan, Namun terkadang didalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal tersebut dengan pada saat diadakannya survey dilapangan oleh Marine Inspector (MI) terkadang masih memakan waktu karena hasil dari survey dilapangan tidak langsung diterima oleh pihak kementerian. Masih adanya proses manual dan juga melibatkan agen-agen kapal untuk mengurusnya. Akibat dari proses yang cukup memakan waktu tersebut maka juga berpengaruh terhadap proses operasi kapal itu sendiri dan dampaknya juga dari segi bisnis tentu berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan pelayaran maupun lebih jauh lagi terganggu dalam rantai pasok barang, maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Proses Penerbitan Sertifikat keselamatan kapal dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian Perpanjangan

Perpanjangan diartikan sebagai proses memperpanjang. Memperpanjang artinya menjadikan lebih lama. (Salim, 2018: 102)

b. Pengertian Sertifikat

Menurut Handoyo, (2014:58), certificates adalah sertifikat kapal yang meliputi seluruh persyaratan dan pernyataan bahwa kapal benar-benar memenuhi persyaratan laik-laut tanpa ada pengecualian. Jadi sertifikat menjadi bukti tertulis bahwa kapal tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

c. Pengertian Keselamatan

Menurut Prayogo (2020) syarat atau sistem manajemen keselamatan kapal bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan sebuah proyek. Kapal Indonesia (Kapal Bendera Indonesia) yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan akan diberikan sertifikat keselamatan. Dalam peraturan Menteri Perhubungan No.17 tahun 2008 Tentang Sertifikat Keselamatan Kapal diberikan kepada semua jenis kapal ukuran GT 7 (Tujuh Gross Tonage) atau lebih, kecuali kapal perang, dan kapal negara.

d. Pengertian Kapal

Menurut Sandy (2021) Kapal merupakan sarana pengangkut penumpang atau barang yang ada dilaut, sungai dan sebagainya yang digerakkan menggunakan tenaga manusia, mesin atau angin.

Menurut KUHD pasal 309 kapal adalah “semua alat berlayar, apa pun namanya dan sifatnya. Sedangkan alat berlayar yang dimaksudkan yaitu benda yang dapat mengapung dan bergerak di air.”

3. METODE PENELITIAN

1. Metode Pengamatan (Field Research)

a. Observasi

Metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung menggunakan seluruh indera untuk mengumpulkan data faktual terkait Proses Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal AHTS PASIFIC BRONZE di PT. Pelayaran Siltor Adimulia Batam pada KSOP Khusus Batam.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui dialog langsung dengan narasumber. Peneliti mengajukan pertanyaan spesifik kepada kru kapal atau Marine Inspector untuk memperoleh informasi mendalam tentang proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

2. Metode Perpustakaan (Library Research)

Pengumpulan data sekunder melalui penelaahan sumber pustaka di perpustakaan Poltek AMI Medan. Tujuannya adalah mendapatkan referensi dan landasan teoritis yang mendukung penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aktifitas Perusahaan PT. Pelayaran Siltor Adimulia dalam Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal

1. Proses Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal AHTS. PASIFIC BRONZE Di Kantor KSOP Batam

Prosedur perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal dimulai dengan pengajuan permohonan oleh agen kapal. Sebelum penerbitan, Marine Inspector melakukan pemeriksaan komprehensif meliputi aspek nautis, teknis, dan kondisi kapal. Pemeriksaan mencakup evaluasi kondisi kapal, peralatan keselamatan, radio, dan mesin. Apabila Marine Inspector menyatakan kapal dalam kondisi layak melalui laporan pemeriksaan yang tidak memiliki kekurangan prinsipil, maka proses perpanjangan sertifikat dapat dilanjutkan. Hasil pemeriksaan menjadi dasar utama dalam memutuskan kelayakan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal (Mandris, 2024). Berikut panduan dalam penerbitan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal di kantor KSOP Batam:

a. Penunjukan *Marine Inspektor*

Pemeriksa keselamatan kapal atau marine inspector menjadi pihak terpenting dalam hal terciptanya keselamatan pelayaran khususnya dalam melakukan pemeriksaan kapal. Setelah permohonan agen di disposisi kemudian keluar surat perintah tugas (SPT) yang diterbitkan oleh syahbandar sebagai penunjukan *marine inspector* untuk melakukan pemeriksaan kapal. Jika permohonan sudah di ajukan kepada pejabat syahbandar setempat, sertifikat tersebut tidak dapat langsung diproses, namun perlu dilakukan pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh petugas syahbandar (*marine inspector*) untuk memastikan kapal masih layak atau terdapat kekurangan yang harus dipenuhi. Jika petugas pemeriksa (*marine inspector*) menyatakan kondisi dalam keadaan baik atau layak, atau terdapat kekurangan maka pemilik kapal wajib memenuhi temuan tersebut agar petugas syahbandar dapat menutup hasil

temuan tersebut sehingga sertifikat dapat diterbitkan dengan masa berlaku 3 bulan. Untuk penerbitan sertifikat permanen pemilik kapal dapat mengajukan permohonan ke Dinas Perhubungan Pusat, yang mana masa sertifikat ini berlaku 5 tahun.

b. *Marine Inspector on board to Vessel*

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa (*marine inspector*) menjadi fokus utama pemeriksaan terkait dengan kondisi kapal, peralatan kapal, radio dan mesin kapal. di bagian ini agen mendampingi petugas pemerintah selama proses pemeriksaan berjalan.

c. Pemeriksaan Konstruksi Kapal

Dalam pemeriksaan ini *marine inspector* memeriksa desain stabilitas, konstruksi dek dan ruang mesin, peralatan keselamatan, sistem pemadam, material. Pemeriksaan konstruksi kapal bertujuan untuk memastikan kapal aman dan layak beroperasi serta untuk memenuhi persyaratan.

d. Pemeriksaan Perlengkapan Kapal

Dalam pemeriksaan ini *marine inspector* memeriksa peralatan keselamatan seperti pelampung, peralatan pemadam kebakaran, sistem alarm, peralatan navigasi dan komunikasi, peralatan P3K, pemeriksaan perlengkapan kapal ini penting untuk memastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik dan kapal siap untuk beroperasi dengan aman.

e. Pemeriksaan Radio Kapal

Dalam pemeriksaan ini *marine inspector* memeriksa sistem komunikasi radio kapal, kondisi fisik radio kapal, kabel dan konektor, uji kemampuan radio, uji jangkauan komunikasi, periksa integrasi radio. Setelah itu mencatat semua masalah atau kekurangan dan potensi dampak yang di temukan selama pemeriksaan.

f. Pemeriksaan Fitness (Kelaikan Kapal)

Dalam pemeriksaan ini *marine inspector* memeriksa struktur kapal, sistem mesin, peralatan keselamatan, sistem navigasi dan komunikasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kelaikan kapal secara umum untuk memastikan kapal dalam kondisi baik dan umum untuk berlayar.

g. Pemeriksaan IMDG (Internasional Maritime Dangerous Goods)

Dalam pemeriksaan ini marine inspector memeriksa Klasifikasi dan label bahwa barang berbahaya diklasifikasikan dengan benar dan di labeli sesuai dengan ketentuan IMDG, kemasan dan penyimpanan memastikan barang berbahaya dikemas dengan benar, Dokumentasi bahwa dokumen pengiriman manifest sesuai dengan regulasi IMDG, peralatan darurat ketersediaan peralatan penanggulangan kecelakaan yang terkait dengan barang berbahaya dan pelatihan awak kapal untuk menangani situasi darurat.

h. Pemeriksaan SMS (Safety Management System)

Dalam pemeriksaan ini marine inspector memeriksa sistem manajemen keselamatan, checklist keselamatan, latihan pendidikan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan kapal, awak kapal, dan muatan selama pelayaran.

i. Setelah marine inspector selesai melakukan pemeriksaan terkait dengan kondisi kapal, peralatan kapal, radio dan mesin kapal dan dinyatakan semua peralatan dan perlengkapan beroperasi dengan baik, maka tahap selanjutnya marine inspector akan menerbitkan surat laporan hasil pemeriksaan. Berlandaskan pemeriksaan di atas sehingga selanjutnya PT. Pelayaran Siltor Adimulia akan melakukan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui billing yang telah di terbitkan pada SIMKAPEL supaya sertifikat keselamatan kapal dapat segera diterbitkan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu sumber pendapatan negara yang tidak berasal dari pajak. PNBP mencakup berbagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti retribusi, denda, dan pemanfaatan kekayaan negara. PT. Pelayaran Siltor Adimulia wajib membayar biaya PNBP tersebut.

j. Penerbitan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal

Pasca pemeriksaan oleh marine inspector dan penyelesaian pembayaran PNBP, proses penerbitan sertifikat baru dilakukan. Syahbandar melakukan penelitian, pengetikan, dan penandatanganan sertifikat setelah memastikan kebenaran dokumen. Tahap akhir mencakup pemberian nomor sertifikat baru yang kemudian diserahkan kepada agen, dalam hal ini PT. Pelayaran Siltor Adimulia Batam.

2. Dokumen-dokumen yang Dipergunakan untuk Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal

Prosedur Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal dengan menyertakan / melampirkan kelengkapan dokumen atau persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Asli Dari Perusahaan

Surat permohonan asli dari perusahaan keagenan kapal menjadi dokumen kunci sebelum pemeriksaan. Surat tersebut memuat informasi detail meliputi nama kapal, pemilik kapal, agen pelayaran, dan jenis sertifikat yang akan diperpanjang. Dokumen dilengkapi cap stempel sebagai bukti pengesahan.

b. Register Certificate / Surat Laut

Surat laut kapal (*certificate of registry*), adalah sertifikat yang menyatakan kebangsaan suatu kapal, yang diberikan oleh pemerintah negara di mana kapal didaftarkan. Dokumen ini mencantumkan informasi penting tentang kapal, seperti nomor registrasi, nama kapal, tonase, dan data pemilik kapal.

c. International Tonnage Certificate / Surat Ukur

Surat ukur kapal (*international tonnage certificate*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan berdasarkan konvensi internasional mengenai pengukuran kapal (*international convention on tonnage measurement of ships*, 1969). Sertifikat ini mencantumkan informasi tentang kapasitas tonase kapal, yang dihitung sesuai standar nasional. Dokumen ini digunakan untuk menentukan kapasitas kargo kapal dan ukuran kapal.

d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Cargo Ship Safety Construction Certificate)

Sertifikat konstruksi keselamatan kapal barang adalah dokumen yang di keluarkan oleh syahbandar untuk memastikan bahwa kapal barang telah memenuhi standar keselamatan dan konstruksi yang ditetapkan. Sertifikat ini menilai struktural dan desain kapal, memastikan bahwa kapal tersebut aman untuk digunakan dalam operasi pengangkutan barang, dan tahan terhadap kondisi operasi di laut. Sertifikat ini penting untuk melindungi keselamatan kapal, awak kapal, serta barang yang diangkut.

e. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Cargo Ship Safety Equipment Certificate)

Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa perlengkapan keselamatan di kapal barang telah memenuhi standar dan persyaratan keselamatan yang ditetapkan. Ini mencakup peralatan seperti rakit penyelamat, jaket pelampung, pelampung, dan peluit. Sertifikat ini berfungsi untuk memastikan bahwa perlengkapan tersebut berfungsi dengan baik dan siap digunakan dalam keadaan darurat.

f. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Cargo Ship Safety Radio Certificate)

Sertifikat keselamatan radio kapal barang adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa sistem radio komunikasi di kapal barang memenuhi standar keselamatan dan persyaratan yang diterapkan oleh otoritas maritim atau Organisasi Internasional seperti (IMO) Internasional Maritime Organization). Sertifikat ini memastikan bahwa perangkat komunikasi radio di kapal, atau sistem komunikasi lainnya berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk komunikasi darurat serta operasional kapal.

g. Laporan Pemeriksaan Kapal

Dokumen yang berisi hasil pemeriksaan dan evaluasi kondisi kapal oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau marine inspector:

- 1) Laporan pemeriksaan konstruksi kapal
- 2) Laporan pemeriksaan perlengkapan kapal
- 3) Laporan pemeriksaan radio
- 4) Laporan pemeriksaan fitness/imdg/sbc

h. Sertifikat Garis Muat (Load Line)

Sertifikat garis muat adalah dokumen yang mengidentifikasi dan mengonfirmasi garis muat atau tanda batas maksimal yang diperbolehkan untuk memuat kapal. sertifikat ini menunjukkan batas maksimum yang aman untuk muatan kapal atau kapal beroperasi dalam kondisi stabil dan aman dengan muatan.

i. Sertifikat Lambung Timbul (Sertifikat Of Classification For Hull)

Sertifikat lambung timbul adalah dokumen yang mengonfirmasi bahwa lambung kapal, khususnya bagian yang timbul di permukaan air, telah di periksa dan memenuhi standar keselamatan serta persyaratan teknis yang di tetapkan oleh lembaga klasifikasi.

j. Sertifikat Klasifikasi Mesin (Machinery Certificate)

Sertifikat klasifikasi mesin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga klasifikasi kapal yang menyatakan bahwa sistem mesin dan peralatan utama kapal telah memenuhi standar teknis dan keselamatan yang ditetapkan. Sertifikat ini mencakup evaluasi dan verifikasi mesin utama, generator, serta sistem propulsi dan tenaga lainnya untuk memastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan klasifikasi.

k. Surat Penunjukan Keagenan (SPK) Kapal dari Ship Owner

Surat penunjukan keagenan kapal adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemilik kapal kepada agen kapal yang ditunjuk untuk mewakili kapal tersebut di suatu pelabuhan atau wilayah tertentu. Surat ini mencakup informasi mengenai identitas kapal, agen yang ditunjuk, serta wewenang dan tanggung jawab agen dalam mengurus berbagai administrasi dan operasional kapal selama berada di pelabuhan.

3. Hambatan dan Kendala Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal

Dalam upaya mencapai hasil optimal, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal:

- a. Lokasi pemeriksaan kapal yang jauh dari Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Batam (KSOP)
- b. Kesulitan menemui Marine Inspector yang terkait langsung dengan proses pengurusan sertifikat
- c. Belum tersedianya sistem aplikasi online untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perpanjangan sertifikat
- d. Permintaan mendadak dari kapal yang sulit dipenuhi seketika
- e. Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen dengan standar yang ditetapkan
- f. Keterlambatan proses administrasi di instansi terkait yang memengaruhi waktu perpanjangan sertifikat
- g. Kendala teknis kapal yang memerlukan perbaikan atau modifikasi untuk memenuhi standar keselamatan

4. Solusi Dalam Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal

Dalam upaya mengoptimalkan proses perpanjangan sertifikat keselamatan kapal, beberapa solusi dapat diterapkan untuk meminimalisasi kendala dan meningkatkan efisiensi administratif:

- a. Memastikan semua dokumen yang diperlukan untuk perpanjangan sertifikat disiapkan dan dipenuhi dengan lengkap. Pihak terkait dapat menyediakan panduan yang jelas mengenai dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
- b. Meningkatkan jumlah tenaga ahli untuk mempercepat proses pemeriksaan dan perpanjangan sertifikat kapal.
- c. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pemilik kapal dan operator mengenai prosedur perpanjangan sertifikat serta regulasi terbaru. Ini membantu dalam memahami dan mematuhi persyaratan dengan lebih baik.
- d. Melakukan perencanaan dan persiapan lebih awal sebelum masa berlaku sertifikat habis untuk menghindari keterlambatan. Pengaturan jadwal pemeriksaan dan perbaikan secepat mungkin dapat membantu menghindari masalah.
- e. Meningkatkan koordinasi antara pihak terkait seperti otoritas pelabuhan, pemilik kapal, dan lembaga sertifikasi untuk memastikan semua berjalan lancar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal AHTS. PASIFIC BRONZE Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam oleh PT. Pelayaran Siltor Adimulia Batam sudah berjalan dengan produktif namun kurang optimal, karena komunikasi atau kerja sama antara pihak terkait seperti otoritas pelabuhan, pemilik kapal, dan lembaga sertifikasi kurang baik.

Saran

Agar Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal AHTS. PASIFIC BRONZE Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam oleh PT. Pelayaran Siltor Adimulia Batam lebih Optimal disarankan meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pihak terkait seperti otoritas pelabuhan, pemilik kapal, dan lembaga sertifikasi untuk memastikan semua berjalan lancar.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Chandradja, J., & Sabila, F. H. (2024). Prosedur perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi kapal melalui sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(3), 261-267.
- Fitriani, R., & Nisrina, I. (2023). Pengaruh transportasi laut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. *Jurnal Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 6(1), 30-33.
- Handoyo, J. J. (2014). *Ketel uap, turbin uap dan turbin gas penggerak*. Utama Kapal, Penerbit Buku Maritim Djangkar.
- Kesuma, N., Sabila, F. H., & Chrisnatalanta, C. (2022). Sistem pengurusan sign on buku pelaut crew kapal di Kantor KSOP Khusus Batam pada PT. Putra Anambas Shipping Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 411-416.
- Nainggolan, F., Yusnidah, Y., & Sabila, F. H. (2023). Prosedur perpanjangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal TB Pancaran 118 pada KSOP oleh PT. Dean Shipping Agensi Batam. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(4), 316-329.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan.
- Prayogo, R. A., Cito, C., & Nur, M. (2020). Prosedur pengurusan perpanjangan sertifikat kapal Logindo Sturdy pada PT. Pelayaran Batam Samudera Pulau Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 2(1), 93-98.
- Sabila, F. H., & Rakawitan, F. (2023). Persiapan peralatan dan dokumen sebelum melaksanakan aktivitas bongkar curah kering pada PT. Wahana Intradermaga Niaga Belawan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 509-519.
- Salim, H. S. (2018). *Peraturan jabatan notaris*. Sinar Grafika.
- Sandy, A. P., Satriyo, G., & Estiari, N. R. (2021). Implementasi kegiatan clearance in dan clearance out kapal UV Royal King Ali pada PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banyuwangi. *Jurnal Kemaritiman dan Transportasi*, 3(2), 84-95.
- Sitompul, G. F., Deliana, M. K., & Sabila, F. H. (2024). Transportation process of container goods from container freight station to container yard at port of PT. Elang Sriwijaya Perkasa Palembang. *PPIMAN: Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3), 296-300.
- Tanjung, A. A., Lilis, L., & Sabila, F. H. (2024). Tata cara pelayanan dan penanganan crew sign on dan sign off pada crew kapal asing di kantor Imigrasi Belawan oleh PT. Karana Line Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 1(1), 33-36.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Wahni, S., Dirhamsyah, D., Handayani, I., & Sabila, F. H. (2024). Penggunaan aplikasi SIMKAPEL dalam pengurusan sertifikat safe manning TB. Samudera Tirta oleh PT. Berlia Ocean Shipping Dumai. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 264-276.

Widodo, B. L. H., Wahyuni, E. T., & Aan, R. (2023). *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 5(2), 102-109.